

**KERJASAMA KEAMANAN MARITIM INDONESIA DAN AMERIKA
SERIKAT, STUDI KASUS: ILLEGAL FISHING PERIODE TAHUN 2014-
2018**

Oleh **Ageng Nurcahyo**

201305103

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

Kerjasama antar negara adalah salah satu peluang suatu negara memenuhi kebutuhan nasionalnya. Keterbukaan negara-negara dalam pembangunan dan pengembangan yang di dorong oleh keterbatasan sumber dayanya menjadi penyebab sebuah negara menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain atas dasar memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memiliki perairan seluas lebih dari 5.8 juta km², dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km². Indonesia berperan penting dalam stabilitas bidang ekonomi karena wilayah perairan yang strategis dilalui oleh jalur perdagangan dunia, juga potensi sumber daya kelautan Indonesia yang sangat melimpah, sehingga bila tidak terkontrol akan memunculkan aktivitas eksploitasi dan terjadi ketidakseimbangan lingkungan kelautan bahkan negara akan mengalami kerugian. Demi menjaga stabilitas keamanan maritime terkait ancaman tradisional dan non-tradisional, Pemerintah Indonesia membentuk aliansi dengan Amerika Serikat untuk menghindari ancaman yang dapat merugikan Indonesia.

Kata Kunci: Kerjasama, Maritim, Keamanan Maritim, *Illegal Fishing*, Amerika Serikat

Pendahuluan

Kerjasama bilateral dapat diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua Negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama. pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya

dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak, proses ini disebut kerjasama.

Indonesia menjalin hubungan politik dan strategis yang cukup baik dengan Amerika Serikat (AS) terutama sejak Rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia yaitu paruh kedua dekade 1960an. Besarnya peluang dan potensi yang dimiliki Indonesia dapat menjadikan peluang bagi Indonesia untuk memajukan perekonomian Indonesia. Selain bertumpu pada sumber daya alam, Indonesia juga didorong dengan konsumsi domestik yang cukup besar dan didukung pula oleh sumber daya manusia yang melimpah dapat menciptakan peluang pasar yang dapat menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut: (Indonesiainvestments, n.d.)

1. Sumber daya alam atau komoditas yang beragam dan melimpah.
2. Populasi generasi muda yang besar dan sedang berkembang.
3. Stabilitas politik.
4. Lokasi yang strategis terhadap perekonomian besar China dan India.
5. Indonesia merupakan pasar berkembang.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya. Selain itu, keanekaragaman bahasa juga dimiliki oleh Indonesia dimana di setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bahasa yang digunakan di Indonesia sebagai bahasa nasional yang diambil dari bahasa melayu. Beberapa bahasa daerah yang digunakan seperti bahasa sunda, jawa, aceh, betawi, dan yang lainnya. Sama halnya dengan bahasa, Indonesia juga memiliki berbagai macam rumah adat. Berbagai macam rumah adat yang dimiliki Indonesia di setiap daerahnya seperti Rumah Joglo. Selain sumber daya alam dan sumber daya manusia, sumber daya budaya juga menjadi modal dasar pembangunan Indonesia. Berbagai macam budaya tersebut dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Jika dikemas dengan baik, kekayaan budaya tersebut dapat menjadi keuntungan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat.

Selain sebagai pariwisata, pemanfaatan budaya juga dilakukan dalam rangka mempererat persahabatan antar negara. Melalui budaya, hubungan antar bangsa dan antar warganya akan makin erat dengan mengenal budayanya.

Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta berada diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.504 dan 111 diklasifikasikan sebagai pulau terluar, selain itu panjang laut Indonesia mencapai 97.000 km dan nomor 2 terpanjang di dunia. Mengenai zona ekonomi eksklusif yang dimiliki Indonesia yaitu 5.800.000 km² dan sumber daya manusia yang menempati posisi nomor 5 di dunia. (Universitas Indonesia, 2018)

Data *Food and Agriculture Organization* di 2012, Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah China dan India. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. (Perumperindo, 2014) Dari angka ini hanya sekitar 10 persen yang saat ini telah dieksplor dan dimanfaatkan.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum merasakan peran signifikan dari potensi maritim yang dimiliki yang ditandai dengan belum dikelolanya potensi maritim Indonesia secara maksimal. Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia, antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam (*deep ocean water*), wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim, sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Keberadaan 4 *Sea Lines of Communication*, 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia, dan 3 jalur pelayaran internasional (Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok), makin menyulitkan pengawasan dan kontrol di wilayah perbatasan, karena semakin padat intensitas pelayaran yang masuk. Luasnya wilayah yang harus dikontrol sementara Indonesia sendiri harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan

terhadap pelayaran internasional sedangkan armada patroli yang dimiliki tidak memadai dan berbanding terbalik dengan banyaknya kasus kejahatan yang terjadi.

Berbagai kegiatan ilegal tersebut menjadikan posisi diplomasi Indonesia di lingkup bilateral maupun multilateral menjadi lemah, oleh karena itu dalam pembahasan lebih lanjut tulisan ini akan mencoba membahas bagaimana potensi maritim yang dimiliki Indonesia dapat meningkatkan posisi tawar diplomasi Indonesia. Indonesia harus menjaga kedaulatan laut dan penegakkan akan pencurian ikan (*illegal fishing*) tentu merupakan tugas berat yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan agar arah kebijakan dan program kemaritiman menjadi jelas dan terukur sehingga ada percepatan realisasi misi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Pemanfaatan atau pengolahan sumber daya alam yang melimpah membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang kreatif dan berwawasan tinggi sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk bekerjasama atau menjadi investor di Indonesia khususnya Amerika Serikat sebagai negara adikuasa di dunia. (WWF, n.d.)

Amerika Serikat Sebagai Mitra Potensial Bagi Indonesia

Amerika merupakan salah satu negara yang mempunyai hegemoni dan kekuatan besar dalam tatanan dunia internasional dimana Amerika selalu yakin memiliki misi bagi dunia dan berbuat untuk kepentingan dunia baik melalui *hard power* maupun menggunakan *soft power*. (Potter, 1990) Kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membuat Amerika menjadi negara yang maju dan besar. Selain itu, kemajuan Amerika juga didukung dengan sumber daya

manusia yang berkualitas yang mampu mengolah sumber daya alam dengan baik dan memiliki standar hidup yang relatif tinggi sehingga tingkat kualitas hidup masyarakatnya memiliki kesejahteraan hidup yang baik. Amerika juga memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi juga pendidikan dan keterampilan yang memadai.

Dalam bidang ekonomi, Amerika merupakan negara maju dengan perekonomian tertinggi di dunia dan juga sebagai negara pelopor organisasi internasional. Amerika memiliki peran penting di berbagai organisasi internasional, salah satunya adalah WTO (World Trade Organization) yang bergerak dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Peran penting tersebut membuat Amerika Serikat memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan arah kebijakan suatu organisasi internasional yang menjadi acuan bagi negara-negara lain dalam merumuskan kebijakan. Kesuksesan perekonomian Amerika tersebut ditunjang oleh tingkat daya beli yang tinggi sehingga membuat perekonomian di Amerika mengalami kemajuan. (Kemenkeu, 2016)

Majunya perekonomian Amerika Serikat tidak luput dari adanya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang baik. Masyarakat produktif yang mengubah sumber daya alam menjadi barang-barang ataupun jasa mampu mendorong perekonomian Amerika. Kualitas sumber daya manusia menjadi hal penting bagi kesuksesan dalam sektor industri di Amerika yang mana menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Amerika itu sendiri. (Christoper, 2004) Banyaknya keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Amerika tersebut, Indonesia ingin tetap menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia.

Hubungan khusus antara Indonesia dengan Amerika telah terjalin melalui kesepakatan “*US-Indonesia Comprehensive Partnership*” atau “Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika” sejak tahun 2010 yang telah ditandatangani oleh kedua menteri luar negeri dari masing-masing negara waktu itu Hillary Clinton dan Marty Natalegawa. Didalam kesepakatan tersebut meliputi beberapa kerjasama dalam

bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Mazrieva, 2015)

Banyaknya kerjasama-kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dengan Amerika Serikat membuat kedua negara ingin terus tetap menjaga hubungan baik antara kedua negara. Dalam menjaga hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat perlu adanya keharmonisan atau saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu pemerintah Indonesia membangun program rumah budaya sebagai pijakan untuk melakukan diplomasi budaya dengan Amerika Serikat.

Pada sektor perdagangan, Amerika melalui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry ingin meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Indonesia yang dinilai mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pesat sebagai salah satu negara APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). (Tempo, 2014) Indonesia merupakan salah satu negara mitra yang penting bagi Amerika karena memiliki peraturan perdagangan yang transparan. Indonesia salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang besar di dunia dan salah satu negara kunci dalam G20 seperti yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Michael Froma. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara eksportir terbesar dengan sumber daya yang melimpah sehingga dinilai dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik dan sistem ekonomi global. Seperti yang diperkirakan oleh *McKinsey Institute* bahwa pada tahun 2030 pertumbuhan kelas konsumen Indonesia dapat mencapai 135 juta dari 45 juta penduduk yang rata-rata pendapatan pertahunnya USD 3.600 per kapita. (Sindo News, 2015)

Apabila Indonesia dan AS menjalin hubungan strategis yang menghindari ilusi dan berfokus pada tiga sasaran keamanan terpisah, yaitu meningkatkan pertahanan di Laut Cina Selatan, memerangi militansi Negara Islam, menumpas pembajakan, dan kejahatan trans-nasional lainnya di Asia Tenggara, maka tak hanya akan meningkatkan keamanan regional tapi juga memajukan kepentingan kedua negara.

Faktor Munculnya Illegal Fishing di Indonesia

Kegiatan *illegal fishing* dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial, (Solihin, 2018) karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, disamping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. (Ihsan, wartaekonomi, 2014)

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (transnational crime) karena kegiatan dan jaringannya

bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia.

Keamanan Maritim merupakan salah satu isu yang terjadi di banyak negara di dunia. Isu keamanan merupakan kenyataan global yang sangat mempengaruhi lingkungan strategis Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara serta lingkungan di Asia Tenggara. Tingginya volume kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan mengancam maupun pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia, dalam hal ini laut adalah sesuatu yang krusial bagi Indonesia sebagai *archipelagic state* adalah sangat penting mengingat Indonesia dikelilingi oleh lautan yang berperan penting dalam aktivitas pemanfaatan laut di Asia Tenggara, sehingga dapat memunculkan berbagai tantangan dalam mempertahankan kedaulatan negara. (Ikhtari, 2011)

Faktor keamanan dapat direncanakan sebagai topik utama karena sebagian besar perekonomian berlangsung melalui transportasi laut, bahkan 90% perdagangan dunia didukung oleh lalu lintas laut sebagai perantara. Isu keamanan maritim bukan lagi perkara politik, ideologi, atau agama, melainkan perebutan sumber daya alam yang keberadaannya di dunia semakin berkurang. Tantangan dalam isu keamanan maritim menjadi beragam mulai dari polusi air, bencana alam, perubahan iklim, SAR, *IUU Fishing*, pembajakan hingga perompakan. Kejahatan maritim yang terjadi di satu titik jalur laut internasional misalnya, *Illegal Fishing* merupakan isu yang sedang marak terjadi di Indonesia, dari tahun ke tahun isu tersebut meningkat. Dengan banyaknya faktor yang menyebabkan Illegal Fishing di Indonesia, pemerintah perlu menindak tegas terhadap nelayan asing yang telah melanggar dan meningkatkan pengawasan penangkapan ikan, pengaturan zona-zona laut Indonesia sesuai dengan aturan regional maupun hukum internasional.

Indonesia tidak terlepas dari keberagaman sumber daya alam yang mumpuni dari berbagai bidang begitu juga dari hasil sektor perikanan yang makin tahun makin

berkembang dari tingkat konsumsi dari tiap Negara. Perlunya pengelolaan yang tepat dari pemerintah untuk dapat memaksimal prospek jangka panjang agar dapat berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini menjadi permasalahan penting karena banyaknya penangkapan ikan berlebihan yang dilakukan oleh nelayan asing secara ilegal sehingga stok perikanan di wilayah tersebut berkurang dan berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan oleh nelayan disekitar pesisir.

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal, Indonesia harus mengelola ketiga jenis laut tersebut secara berkelanjutan dan menyeluruh bagi kepentingan bangsa Indonesia. Agar dapat optimal, pengelolaan laut Indonesia tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya kelautan saja tapi juga meliputi pengawasan penangkapan ikan, khususnya oleh kapal-kapal asing dan pengaturan zona-zona laut Indonesia sesuai dengan aturan regional maupun hukum internasional.

Sebagai bentuk tindakan keputusan presiden Jokowi melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, ingin berupaya memerangi kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Kegiatan memerangi *illegal fishing* tersebut diwujudkan melalui pembakaran dan penembakan kapal-kapal laut asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Kebijakan penembakan kapal ini merupakan strategi Jokowi dalam memberikan efek jera dan penggetar (*deterrence*) terhadap negara lain. Efek penggetar juga sekaligus menjadi sinyal ancaman yang berfungsi sebagai strategi pencegah untuk meyakinkan target bahwa Indonesia secara serius menegakkan kedaulatan teritorialnya dengan melakukan pembakaran dan penembakan kapal asing sehingga diharapkan memberikan efek jera dalam kegiatan *illegal fishing* (Nugraha et al, 2016).

Maraknya kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di Indonesia semakin merugikan Indonesia. Kerugian tersebut berdampak pada ancaman mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dimasa yang

akan datang. Berikut ini beberapa pemicu terjadinya *Illegal Fishing* di Indonesia. (Syahrin, 2018)

Kebutuhan Permintaan Ikan Dunia Meningkat

Indonesia merupakan salah satu penyumbang utama produksi perikanan dunia dan sebagai penghasil kedua ikan terbesar dari perikanan tangkap maupun budidaya. Seiring peningkatan populasi penduduk dunia permintaan produksi ikan untuk pemenuhan kebutuhan makanan meningkat.

Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D. Eng, di East Parc Hotel Yogyakarta, Senin (24/7) mengatakan bahwa Pada tahun 2014 tingkat konsumsi ikan ini pun menjadi 38 kg per kapita per tahun dari target nasional 40 kg per kapita per tahun. Oleh karena itu, dengan luas perairan dan lautan yang dimiliki maka produksi perikanan Indonesia berpotensi untuk di tingkatkan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa peluang perikanan Indonesia dalam sektor ekonomi melalui produksi perikanan. Karena itu, pengembangan sektor perikanan harus diarahkan untuk membangun sektor perikanan yang maju, efisien dan tangguh dengan memanfaatkan sumber daya perikanan. Selain itu Indonesia kaya akan sumberdaya hayati, luas laut dan memiliki garis pantai terbanyak kedua. Dengan produksi rumput laut tertinggi di dunia hingga 36 persen maka kontribusinya terhadap kebutuhan rumput laut dunia ini menjadikan posisi strategis Indonesia.

Dengan tingginya harga dan permintaan ikan dan disisi lain pasokan ikan di dunia menurun maka terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut. Para pengusaha ikan tersebut pun akhirnya mengalihkan dan mencari *Fishing ground* atau tempat penangkapan ikan yang baru. Hal ini maka mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau *illegal*. Negara-negara tersebut memanfaatkan setiap celah untuk terus dapat menangkap ikan salah satu di Indonesia.

Overfishing

Penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*) di perairan laut Indonesia adalah akses terbuka perikanan. Akses terbuka perikanan terjadi karena aturan pengelolaan yang diterapkan belum mampu mencegah terjadinya penangkap ikan ilegal. Banyak nelayan dari negara-negara lain yang terus termotivasi untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya karena jika tidak, maka nelayan lain yang akan menangkapnya. Hal ini berdampak pada kepunahan sumber daya laut Indonesia. Di wilayah perairan laut Indonesia, apalagi di dekat pantai, banyak nelayan skala kecil yang menangkap ikan saat ini dibebaskan dari aturan pengelolaan perikanan. Dugaan krisis perikanan merupakan akibat langsung dari *overharvesting* sumber daya perikanan yang parah, yang antara lain disebabkan oleh teknologi penangkapan ikan yang modern. (Atmaja, 2011) Penggunaan teknologi maju armada penangkapan mengalami perkembangan yang sangat pesat melampaui tingkat hasil tangkapan.

Penangkapan yang tak mengenal musim dan di lakukan terus menerus adalah kelangkaan ikan atau *over fishing*. Tempat penangkapan ikan atau *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan. Dengan berkurangnya pasokan di negara asalnya maka kapal-kapal asing tersebut terus berupaya dan mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan. (theconversation, 2017)

Kurangnya Pengawasan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan penyebab aksi *illegal fishing* adalah kondisi pengawasan dan keamanan yang lemah di perairan Indonesia. Setiap negara memperketat aturan lautnya dalam sepuluh tahun terakhir, seperti Afrika, Timur Tengah, India, dan Australia. Maka pencari ikan akhirnya datang ke Indonesia yang kondisinya relatif mudah ditembus sehingga banyak negara-negara perbatasan yang datang ke Indonesia untuk

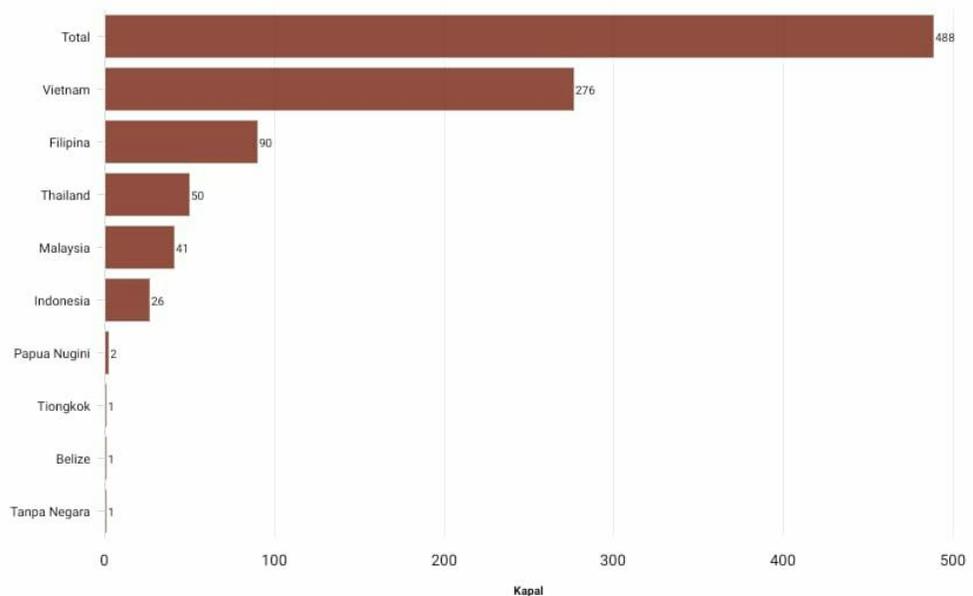
mengambil ikan. Untuk itu harus ada peraturan yang ada agar tidak ada lagi aksi *illegal fishing* di perairan Indonesia. (Ihsan, 2018)

Alasan ini terus menjadi permasalahan yang klasik dari di mulainya kurangnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia dan belum bisa teroptimalkan dengan sangat serius. Salah satu permasalahan yang belum teratasi adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sehingga orang asing bebas keluar masuk ke dan dari wilayah laut Indonesia. Tidak heran apabila nelayan asing illegal beranggapan bahwa menangkap ikan di wilayah laut Indonesia tidak dilarang.

Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya upaya penegakkan hukum di Indonesia mengakibatkan kasus *illegal fishing* oleh nelayan asing illegal tidak kunjung usai. Peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, kerap tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakkan hukum yang jelas hingga akhirnya kasus-kasus pencurian dan terlepasnya kembali pelaku-pelaku pencurian sering terjadi, serta adanya aturan hukum yang memberikan kemudahan khusus keimigrasian (Dahsuskim) kepada nelayan asing illegal yang menangkap ikan di wilayah laut Indonesia, dimana nelayan asing bebas untuk turun ke darat untuk pendaftaran dan sidik jari, bebas dari keharusan memiliki izin masuk dan Visa, sehingga orang asing bebas keluar masuk ke dan dari wilayah laut Indonesia. Tidak heran apabila nelayan asing illegal beranggapan bahwa menangkap ikan di wilayah laut Indonesia tidak dilarang. (TNI, 2016)

Gambar 1.1 Kapal Ilegal Yang Sudah Ditenggelamkan KKP(Nov 2014- Agt 2018)



Sumber:(katadata, 2019)

Dari Grafik diatas Sebanyak 276 kapal ikan ilegal yang ditenggelamkan berbendera Vietnam atau sekitar 57% dari total. Dalam menjaga integritas wilayah dan populasi ikan di perairan Indonesia, pemerintah dengan tegas menindak kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Di bawah kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 488 kapal ilegal yang tertangkap beroperasi di perairan Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 276 kapal ikan yang ditenggelamkan berbendera Vietnam atau sekitar 57% dari total. Kemudian diikuti Filipina (90 kapal) dan Thailand (50 kapal). Sementara kapal nelayan Indonesia yang ditenggelamkan sebanyak 26 kapal. Sebagai informasi, sepanjang tahun lalu KKP telah menangkap 109 kapal ilegal. Sebanyak 29 kapal berbendera Vietnam, 7 kapal berbendera Malaysia, 5 kapal berbendera Filipina. Adapun yang berbendera Indonesia mencapai 68 kapal. (Katadata)

Modus *illegal fishing* seperti penggunaan *flag of convenience* atau izin penggunaan kapal berbendera asing dengan maksud untuk mendorong dan memberikan kesempatan kepada pengusaha pelayaran nasional memiliki kapal berbendera Indonesia dengan menerbitkan kebijakan dispensasi syarat bendera atas

penggunaan kapal berbendera asing di perairan Indonesia. Kebijakan tersebut dikeluarkan sejak awal tahun 1970-an terkait Instruksi Presiden No 5/2005 dan UU No 17/2008 tentang Pelayaran.(Batti, 2011) Peraturan tersebut disalahgunakan oleh beberapapemilik yang berada dalam negara lain, *false claim* bendera melalui pemalsuan dokumen, perekrutan ABK dari negara lain tanpa dokumen perizinan yang lengkap, hingga *fraud landing* (tidak mendeklarasikan/melaporkan jenis dan jumlah ikan dengan benar).

Adapun di sektor penerimaan pajak, pemerintah telah menerima pajak sektor perikanan tangkap sebesar Rp 232 miliar (dari 850,1 miliar pada tahun 2016 menjadi 1,082 milyar (satu triliun delapan puluh dua milyar) rupiah pada tahun 2017). Penerimaan pajak sektor perikanan tahun 2017 ini merupakan yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Satgas 115 merupakan salah satu contoh penegakan hukum satu atap yang memudahkan kelancaran koordinasi antar lembaga pemerintah terutama lembaga penegak hukum. Pola penegakan hukum satu atap ini memudahkan penerapan multi-rezim hukum. (KKP, 2017)

Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia Dan Amerika Serikat Sebagai Upaya Untuk Mencegah Illegal Fishing

Indonesia dan Amerika Serikat pada dasarnya telah memiliki hubungan diplomatik dalam rentang waktu yang cukup lama. Kedua negara juga terlibat dalam berbagai kerjasama multilateral, baik di dalam forum regional maupun internasional. Sedangkan secara bilateral, kerjasama komprehensif antara kedua negara sangat erat.

Dengan adanya kebijakan poros maritim dunia yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, pembangunan di bidang maritim akan diterapkan oleh pemerintah. Masih banyak permasalahan-permasalahan umum disektor maritim, untuk itu, pemerintah membutuhkan kerjasama maritim yang dapat membangun serta mengurangi berbagai macam permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Kerjasama maritim Indonesiadengan Amerika Serikat adalah kesepakatan yang tepat oleh Presiden Joko Widodo, hal ini dikarenakan adanya kebutuhan-

kebutuhan yang di perlukan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kerjasama keamanan maritim Indonesia dan Amerika Serikat tersebut sebagai upaya untuk mencegah permasalahan *Illegal Fishing* yang semakin memburuk dengan meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau. Salah satu kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Amerika Serikat yaitu dengan pengadaan teknologi dimana Badan Nasional dan Kelautan Atmosferik (NOAA) Amerika bekerjasama dengan kemitraan yang ada di Indonesia untuk meneliti fenomena alam laut seperti gempa, cuaca ekstrem dan fenomena oseanografi lainnya. Selain itu kedua negara bekerjasama perihal keamanan Kawasan dimana *U.S. Coast Guard* dan Program *Export Control and Related Border Security Program* Departemen Luar Negeri AS menyelenggarakan pelatihan untuk petugas penjaga pantai. Program Keamanan Pelabuhan Internasional dari *US Coast Guard* juga melakukan peningkatan kapasitas untuk memenuhi standar keamanan kapal dan pelabuhan. (Bakamla, 2015)

Pengadaan Teknologi

Pemerintah Indonesia bekerjasama untuk mengurangi *illegal fishing* dengan *United States Agency for International Development (USAID)* beserta masyarakat dan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan USAID. (BMKG, 2016) Untuk menjaga ekosistem laut Indonesia dari kegiatan pencurian ikan yang tidak dilaporkan atau *illegal fishing*, Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Indonesia berupa pengadaan teknologi fasilitas *alert system* di 86 MPA (*marine protected area*) melalui pemanfaatan data satelit *VIIRS* untuk mendeteksi kapal (*VIIRS boat detection*). (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017)

Melalui kemitraan ini, kemudian USAID dan MDPI mengembangkan sistem yang inovatif untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut. Sistem tersebut adalah *CDT Catch Documentation and Traceability (CDT)* merupakan sebuah alat elektronik

yang dapat memantau rantai makanan habitat laut, dapat mengumpulkan dan melakukan validasi data utama produk tuna, termasuk legalitas dan pergerakannya, dari tempat penangkapannya hingga sampai ke konsumen akhir. (Kurniawan, 2016)

Keamanan Kawasan

Pada tahun 2014, Penjaga Keamanan Pantai AS atau *U.S. Coast Guard* dengan Program *Export Control and Related Border Security Program* (EXBS) Departemen Luar Negeri AS menyelenggarakan pelatihan untuk petugas penjaga pantai Indonesia, 24 petugas KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) Indonesiamenyelesaikan pelatihan *Boarding Officer Course* selama 2 minggu dibawah bimbingan empat instruktur dari *U.S. Coast Guard*. (US Embassy, 2014)Pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam mengukur stok ikan dan mengembangkan strategi pemanfaatan perikanan serta peran mereka dalam pengembangan rencana pengelolaan perikanan. Tak hanya itu, pelatihan tersebut juga memberikan pemahaman kepada peserta tentang pentingnya evaluasi data dan proses mengkaji data sebagai bagian dari proses monitoring. Keahlian tersebut berperan penting dalam perbaikan pengelolaan perikanan di Indonesia.

Selain Program Keamanan Pelabuhan Internasional dari *US Coast Guard* berguna untuk melakukan peningkatan kapasitas memenuhstandar Keamanan Kapal dan Pelabuhan Internasional (*International Ship and Port Security*). Amerika Serikat melalui Program EXBS memberikan sejumlah peralatan keamanan di pelabuhan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diantaranya berupa radio komunikasi, CCTV, generator, komputer, tiang lampu dan *vehicle inspection mirror* dengan total nilai US \$1.020.000. (Dephub, 2012) Fasilitas Pelabuhan di Indonesia sampai akhir 2017 yang sudah 'comply' berjumlah 348 fasilitas pelabuhan, fasilitas pelabuhan di Indonesia secara penuh telah mengimplementasikan *The International Ship and Port Facility Security* (ISPS) Code. ISPS Code merupakan langkah-langkah

khusus untuk meningkatkan keamanan maritim dalam Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (Safety of Life at Sea - SOLAS) (Dephub, 2018) Oleh karena itu selain mendapatkan bantuan peralatan, Indonesia juga akan mendapatkan bantuan pelatihan SDM. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kedua negara serta mencegah ancaman keamanan di sektor transportasi laut.

Kesimpulan

Kerjasama antar negara adalah salah satu peluang suatu negara memenuhi kebutuhan nasionalnya. Keterbukaan negara-negara dalam pembangunan dan pengembangan yang di dorong oleh keterbatasan sumber dayanya menjadi penyebab sebuah negara menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain atas dasar memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Seperti halnya negara berkembang yang merupakan mitra kerjasama strategis bagi negara maju seperti Amerika Serikat yang sudah sejak lama menjalin dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara salah satunya Indonesia dalam meningkatkan produktifitas perekonomian di bidang kelautan.

Perairan Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia, selain itu juga Indonesia memiliki ekosistem laut yang bagus. *Illegal Fishing* adalah salah satu ancaman bagi Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Sejak tahun 2014-2018 sanyak 276 kapal ikan ilegal yang ditenggelamkan berbendera Vietnam atau sekitar 57% dari total. Dalam menjaga integritas wilayah dan populasi ikan di perairan Indonesia, pemerintah dengan tegas menindak kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Maraknya kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di Indonesia semakin merugikan Indonesia. Kerugian tersebut berdampak pada ancaman mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dimasa yang

akan datang. Untuk itu pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dalam bidang maritim dengan Amerika Serikat karena Amerika Serikat memiliki teknologi dan keamanan laut yang memadai dan canggih sehingga dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia.

Referensi

BUKU

Arifinsjah, D. (2012). KAJIAN KERJA SAMA BILATERAL. *INDONESIA – AMERIKA SERIKAT*, 5.

Atmaja, S. B. (2011). OVERFISHING PADA PERIKANAN PUKAT CINCIN SEMI INDUSTRI. *KKP*.

Christoper, C. (2004). Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat. office of international information programs U.S departemen of state.

Ikhtiari, R. W. (2011). Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus Illegal Fishing tahun 2004-2010. 8.

Indonesiainvestments. (n.d.). *Indonesiainvestments*. Retrieved from Indonesiainvestments: <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177?>

Katadata. (n.d.). Retrieved from Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/31/488-kapal-ikan-ilegal-ditenggelamkan-kkp-di-bawah-kepemimpinan-susi-pujiastuti>

Potter, D. M. (1990). Bangsa Yang Makmur. In *Kemakmuran Ekonomi Dan Watak Amerika* (p. 126). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Solihin, A. (2018). Politik Hukum Kelautan dan Perikanan. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. 11.

INTERNET

- Bakamla. (2015, Oktober 28). Retrieved from https://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/1517/27e396aac14db6205ecb61ecaf1d2eb6
- Batti, P. (2011, Maret 29). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d9188a2cc3ef/kepemilikan-flag-of-convenience--berdayakan-perusahaan-pelayaran-nasional-broleh--pieter-batti>
- BMKG. (2016, Februari 17). Retrieved from <http://www.bmkg.go.id/berita/?p=bmkg-dukung-poros-maritim-dengan-observasi-laut-melalui-kegiatan-ina-prima&lang=ID>
- Dephub. (2018, Januari 23). Retrieved from <http://hubla.dephub.go.id/berita/Pages/348-FASILITAS-PELABUHAN-DI-INDONESIA-TERAPKAN-ISPS-CODE-DI-TAHUN-2017.aspx>
- katadata. (2019, January 31). Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/31/488-kapal-ikan-ilegal-ditenggelamkan-kkp-di-bawah-kepemimpinan-susi-pujiastuti>
- Kemenkeu. (2016). Retrieved from Kemenkeu: <http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-kerja-sama-bilateral-indonesia-amerikaserikat-di-bidang-ekonomi-dan-keuangan>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017, Februari 16). Retrieved from <https://kkp.go.id/artikel/1538-as-dukung-kebijakan-kelautan-dan-perikanan-berkelanjutan-di-indonesia-2>
- KKP. (2017). *Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: <https://kkp.go.id/artikel/7551-hingga-november-2018-pemerintah-tangani-134-kasus-illegal-fishing>
- Kurniawan, Y. (2016, Juli 23). Retrieved from <https://citraindonesia.com/kkp-terapkan-traceability-melalui-logbook/>
- Mazrieva, E. (2015, Oktober 26). *VOA Indonesia*. Retrieved from VOA Indonesia: <http://www.voaindonesia.com/a/kemitraan-komprehensif-indonesia-amerika-/3022841.html>
- Perumperindo, H. (2014). *Perumperindo*. Retrieved from Perumperindo: <http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>
- Tempo. (2014, November 10). Retrieved from Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/10/078620893/obama-indonesia-berkontribusi-bagikeamanan-dunia>

theconversation. (2017, November 28). Retrieved from theconversation:

<http://theconversation.com/pengelolaan-perikanan-berbasis-hak-berpotensi-mengurangi-penangkapan-ikan-berlebihan-85807>

TNI. (2016, November 16). Retrieved from

<https://www.tnial.mil.id/TroopInfo/PeneranganPasukan/tabid/104/articleType/ArticleView/articleId/39/ANALISIS-HUKUM-KELEMBAGAAN-BAKORKAMLA.aspx>

US Embassy. (2014, September 24). Retrieved from

<https://id.usembassy.gov/id/memperkuat-keamanan-maritim-melalui-pelatihan-kesatuan-penjaga-laut-dan-pantai-indonesia-amerika-serikat/>

WWF. (n.d.). *WWF Indonesia*. Retrieved from WWF Indonesia:

https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/marine_buddies/